

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AL MAQRIZI TENTANG PENGGUNAAN MATA UANG DINAR DAN DIRHAM UNTUK STABILITAS EKONOMI

A. Pandangan Imam Al-Maqrizi tentang Penggunaan Mata Uang Dinar dan Dirham

Di masa hidupnya, Imam Al-Maqrizi lebih dikenal sebagai seorang pengkritik keras terhadap kebijakan-kebijakan moneter yang telah diterapkan pemerintahan Bani Mamluk Burji yang juga dianggap sebagai sumber malapetaka yang telah berakhir hancurnya perekonomian negara dan masyarakat Mesir. Akan tetapi perilaku para penguasa Mamluk Burji yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama dan moral telah berakibat pada krisis ekonomi yang sangat parah yang didominasi dengan kecenderungan inflasioner yang terus semakin diperburuk dengan menyebarnya wabah penyakit menular yang dialami Mesir selama beberapa waktu. Pada periode inflasi tersebut, seluruh sistem moneter melemah keseimbangan justru karena berbagai elemen sistem tidak bergerak bersama-sama (Millicent & Turrone, 1937, hlm. 360). Karena Situasi itu, telah menginspirasi Imam Al-Maqrizi untuk mempresentasikan berbagai pandangannya mengenai sebab-sebab krisis dalam sebuah karyanya, yang berjudul *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf Al-Ghummah*. (Addel Allouche, 1994, hlm. 13).

Sebagai seorang sejarawan, Imam Al-Maqrizi mengemukakan beberapa pandangannya mengenai uang dengan penelaahan sejarah mata uang yang dipakai oleh umat manusia. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk, dan daya beli uang.

1. Sejarah dan Fungsi Uang Bagi Al-Maqrizi,

Mata uang memiliki peranan yang cukup penting dalam kehidupan umat manusia karena, dengan adanya uang manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas dalam kehidupannya.

Menurut Imam Al-Maqrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Dalam mencapai tujuan ini, mata uang yang digunakan hanya terdiri dari emas dan perak. (Maqrizi, 1986, hlm. 73 dikutip dalam buku Adiwarmanto Karim, 2004, hlm. 386). Dalam sejarah perkembangannya, Imam Al-Maqrizi menjelaskan bahwa dinar dan dirham digunakan bangsa Arab Jahiliyah sebagai mata uang mereka yang masing-masing diambil dari Romawi dan Persia serta memiliki bobot dua kali lipat di masa Islam. (Maqrizi, 1986, hlm. 73 dikutip dalam buku Adiwarmanto Karim, 2004, hlm. 386). Sesudah Islam datang, Rasulullah saw memutuskan atauran tentang berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang

tersebut, bahkan menghubungkannya dengan zakat harta (Karim, 2004, hlm. 386).

Penggunaan kedua mata uang ini pun terus berlanjut tanpa mengalami perubahan sedikit pun sampai tahun 18 H ketika khalifah Umar bin Khattab menambahkan lafaz-lafaz Islam pada kedua mata uang tersebut. (Maqrizi, 1986, hlm. 35 dikutip dalam buku Adiwarmarman Karim, 2004, hlm. 386). Dengan banyaknya perubahan yang cukup signifikan terhadap mata uang ini terjadi pada tahun 76 H. Setelah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan, Khalifah Abdul Malik ibn Marwan melakukan reformasi moneter melalui pencetakan dinar dan dirham Islam. (Maqrizi, 1986, hlm. 40 dikutip dalam buku Adiwarmarman Karim, 2004, hlm. 386).

Penggunaan mata uang dinar dan dirham pun terus berlanjut, tanpa mengalami perubahan yang berarti, hingga pemerintahan Al-Mu'tashim, khalifah terakhir dinasti Abbasiyah. Menurut pandangan Imam Al-Maqrizi, kekacauan mulai muncul ketika pengaruh kaum Mamluk yang semakin kuat di lingkungan istana, termasuk terhadap kebijakan pencetakan mata uang dirham campuran. (Maqrizi, 1986, hlm. 57 dikutip dalam buku Adiwarmarman Karim, 2004, hlm. 386).

Diciptakannya mata uang fulus yang terbuat dari lembaga, dimulai pada masa pemerintahan Dinasti Ayyubiyah, Sultan Muhammad Al-Kamil ibn Al-Adil Al-Ayyubi, yang ditujukan sebagai alat tukar terhadap

barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 fulus dalam setiap dirhamnya, (Maqrizi, 1986, hal. 68-70 dikutip dalam buku Adiwarmarman Karim, 2004, hlm. 387).

Setelah pemerintahan Sultan Al-Kamil, mata uang tersebut terus dicetak hingga pejabat di tingkat provinsi terpengaruh laba yang besar dari kegiatan ini. Kebijakan sepihak mulai diterapkan dengan meningkatkan volume pencetakan fulus dan memutuskan bahwa rasio 24 fulus per dirham. Oleh karena itu, berakibat pada rakyat mengalami kerugian besar karena barang-barang yang sebelumnya berharga $\frac{1}{2}$ dirham naik menjadi 1 dirham. Akibatnya situasi ini menjadi semakin memburuk ketika aktivitas pencetakan fulus semakin menyebar pada masa pemerintahan Sultan Al-Adil Kitbugha dan Sultan Al-Zahir Barquq yang menyebabkan menurunnya nilai mata uang dan kelangkaan barang-barang (Maqrizi, 1986, hlm. 71-72 dikutip dalam buku Adiwarmarman Karim, 2004, hlm. 387).

Dengan banyaknya fakta sejarah tersebut, menurut Imam Al-Maqrizi, mengindikasikan bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik dimata hukum, logika, ataupun tradisi, hanya yang berasal dari emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang memakai bahan selain kedua logam ini tidak layak untuk disebut dengan mata uang. (Maqrizi, 1986, hlm. 80 dikutip dalam buku Adiwarmarman Karim, 2004, hlm. 387). Akan tetapi, ia menyebutkan bahwa keberadaan fulus tetap dibutuhkan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak

signifikan dan untuk berbagai biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. (Karim, 2004, hlm. 388).

Dengan kata lain, penggunaan fulus hanya diizinkan dalam berbagai transaksi yang berskala kecil. Akan tetapi, walaupun menekankan urgensi penggunaan kembali mata uang yang terbuat dari emas dan perak, Imam Al-Maqrizi sadar bahwa uang bukan satu-satunya faktor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga. Baginya penggunaan mata uang emas dan perak tidak langsung menghilangkan inflasi dalam perekonomian karena inflasi juga dapat terjadi akibat faktor alam dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa (Karim, 2004, hlm. 388).

2. Implikasi Penciptaan Mata Uang Buruk

Imam Al-Maqrizi menyebutkan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan menyebabkan lenyapnya mata uang yang berkualitas baik (Maqrizi, 1986, hlm. 66 dikutip dalam buku Adiwarmanto Karim, 2004, hlm. 388) . Hal ini terlihat jelas ketika ia menggambarkan situasi moneter pada tahun 569 H. Pada masa pemerintahan Sultan Shahaaluddin Al-Ayyubi itu, mata uang yang dicetak memiliki kualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah beredar. Untuk menghadapi kenyataan itu, masyarakat akan cenderung untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan juga meleburnya menjadi sebuah perhiasan serta meninggalkan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya, mata uang lama keluar dari

peredaran. (Maqrizi, 1986, hlm. 66-67 dikutip dalam buku Adiwarman Karim, 2004, hlm. 388).

Bagi Imam Al-Maqrizi, hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing telah menerapkan kebijakan yang berbeda dalam proses pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. contohnya, jenis dirham yang sudah ada dirubah hanya untuk merefleksikan penguasa pada saat itu. Pada kasus lain terdapat beberapa perubahan tambahan dalam komposisi logam yang digunakan untuk pembentukan dinar dan dirham.

Oleh karena itu, berakibat terjadinya ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi ketika pasokan logam bahan mata uang tidak cukup untuk memproduksi sejumlah unit mata uang. Sama halnya ketika harga emas atau perak sedang mengalami penurunan. (Maqrizi, 1986, hlm. 67 dikutip dalam buku Adiwarman Karim, 2004, hlm. 388).

3. Konsep Daya Beli Uang

Imam Al-Maqrizi mengatakan bahwa, pencetakan mata uang harus diberikan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini, berakibat pada terjadinya peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan kegiatan produksi yang dapat menyebabkan daya beli riil uang mengalami penurunan (Karim, 2004, hlm. 389).

B. Pandangan Imam Al-Maqrizi tentang Mata Uang Dinar dan Dirham terhadap Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi didefinisikan sebagai kondisi di mana sebuah negara atau wilayah mengalami stabilitas dan keseimbangan dalam berbagai aspek ekonomi tanpa adanya fluktuasi atau gangguan yang signifikan.

Dalam perspektif Islam, stabilitas ekonomi dapat dibahas dengan dua pandangan, yaitu dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

1. Kebijakan fiskal dalam meningkatkan stabilitas ekonomi.

Kebijakan fiskal dalam ekonomi islam bertujuan untuk menciptakan sebuah stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga pemerataan pendapatan. Bukan hanya itu saja, fiskal menurut ekonomi islam juga bertujuan untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat menengah kebawah dan juga untuk menyebarkan ajaran islam. Untuk menciptakan stabilitas ekonomi, kebijakan fiskal menggunakan beberapa bentuk instrumen ekonomi, yaitu :

a) Zakat.

Zakat ialah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin yang sudah memiliki tanah dan mempunyai pendapatan maka mereka itu harus membayar zakat kepada mustahiq zakat.

b) Jizyah.

Jizyah ialah pajak perlindungan sebagai jaminan yang diberikan kepada kaum non-muslim, yang mana penduduk non-muslim ini tinggal wilayah muslim dan juga menerima fasilitas muslim oleh krena itu, mereka wajib membayar jizyah (Karim, 2009, hlm. 264).

c) Fa'i.

fa'I adalah harta hasil rampasan perang yang dapat diperoleh dari suatu wilayah perang tanpa harus melakukan peperangan artinya wilayah tersebut memang ditinggalkan begitu saja oleh penduduknya, ataupun karena mereka tidak memberikan perlawanan dan mungkin juga telah terjadi kesepakatan damai.

d) Kharaj.

Kharaj ialah pajak yang dibebankan kepada rakyat karena tanah-tanah yang produktif yang mereka miliki.

e) Ushr.

Ushr ialah pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat yang menganut agama Islam maupun tidak, yang bekerja sebagai pedagang atau yang lebih dikenal dengan bea cukai.

f) Khumus.

Khumus ialah pajak dari hasil aktivitas ekonomi khususnya dalam kegiatan ekspor impor sebanyak 5%.

g) Amwal Fahla.

Amwal Fahla dikenal sebagai harta yang di ambil alih dari kaum muslim yang wafat atau ahli warisnya meninggalkan harta itu di luar negeri.

2. Kebijakan moneter dalam meningkatkan stabilitas ekonomi.

Kebijakan moneter akan berkaitan dengan mata uang atau uang yang beredar dalam negara dalam istilahnya kebijakan moneter akan selalu berhubungan dengan suku bunga jika itu berada pada moneter konvensional. Namun, jika berada pada moneter Islam maka moneter akan berhubungan dengan dinar, emas dan perak.

Adapun instrumen kebijakan moneter dalam menciptakan dan menjaga stabilitas ekonomi dalam hal mata uang. Yaitu :

- a) Reserve ratio, yaitu jenis suku bunga yang tidak sepenuhnya ditentukan dari berapa banyak simpanan bank yang dimiliki oleh Bank Nasional
- b) Moral Suassion, merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk tujuan meningkatkan permintaan kredit.
- c) Lending Ratio diartikan sebagai sebuah pinjaman kebaikan (Qardhul Hasan).
- d) Islamic Sukuk, ialah sebuah obligasi pemerintah, dimana pada saat negara sedang mengalami inflasi maka pemerintah akan mengeluarkan suku atau obligasi syariah.

- e) Profit Sharing Ratio, ialah ratio bagi hasil yang harus ditetapkan sebelum melakukan sebuah kegiatan bisnis.
- f) Discount rates: dikarenakan adanya pelarangan mengenai riba maka jenis instrumen ini tidak bias digunakan seluas-luasnya

Imam Al-Maqrizi memiliki pandangan yang menarik tentang mata uang dinar dan dirham dalam konteks stabilitas ekonomi di wilayah Mesir pada masanya. Dia adalah seorang sejarawan Muslim yang hidup di abad pertengahan, yang mencatat banyak peristiwa ekonomi dan keuangan selama masa pemerintahan Mamluk di Mesir.

Dalam salah satu karyanya yang berjudul *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf Al-Ghummah*, Imam Al-Maqrizi menguraikan tentang krisis ekonomi yang sedang dialami oleh wilayah Mesir pada masa itu, yaitu masa pemerintahan dinasti Mamluk. Pada saat itu, Mesir sedang mengalami ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkan terjadinya inflasi. Menurut Imam Al-Maqrizi inflasi diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh faktor kesalahan manusia.

1 Faktor Alamiah

Inflasi jenis ini merupakan inflasi yang diakibatkan oleh bermacam faktor alamiah, yaitu inflasi yang tidak akan biasa dihindari oleh manusia. Imam Al-Maqrizi mengatakan bahwa ketika suatu bencana alam terjadi, bahan makanan dan hasil bumi lainnya akan menurun secara drastis dan

akan terjadi kelangkaan. Namun, karena sifatnya yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, minat terhadap produk lain telah meningkat. Biaya telah jauh melampaui daya beli masyarakat. Hal ini berpengaruh pada peningkatan harga barang dan produk lainnya. Selanjutnya, pertukaran mata uang melambat, bahkan terhenti secara umum, yang pada akhirnya menyebabkan kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di antara orang-orang.

Kondisi yang tidak bisa dihindari ini memaksa individu untuk meminta otoritas publik untuk segera fokus pada kondisi mereka. Untuk mengatasi kegagalan ini, pemerintah menghabiskan banyak aset yang menyebabkan penyimpanan negara mengalami penurunan yang parah karena, di sisi lain, pemerintah tidak menerima persediaan yang besar. Dengan demikian, pemerintah menghadapi defisit anggaran keuangan dan negara, baik secara strategis, secara moneter dan sosial menjadi goyah, yang kemudian menyebabkan kehancuran suatu pemerintahan (Al-Maqrizi, 1986 hlm. 27-49 dikutip dalam buku Euis Amalia, 2005, hlm. 268).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, meski bencana telah berlalu, namun kenaikan harga terus terjadi. Hal ini merupakan konsekuensi dari peristiwa bencana di masa lalu yang menyebabkan tindakan moneter, khususnya di bidang produksi, menemui hambatan. Ketika keadaan sudah normal, pasokan produk-produk penting seperti benih padi belum

bertambah, bahkan jumlahnya masih sedikit, sementara minat terhadap benih padi meningkat tajam.

Oleh karena itu, harga barang-barang tersebut mengalami peningkatan yang kemudian diikuti oleh peningkatan biaya berbagai jenis tenaga kerja dan produk, termasuk upah dan tingkat upah buruh (Al-Ashraf Sha'ban, 1376 Al-dalam Al-Maqrizi, 186, hlm. 50-51 dikutip dalam buku Euis Amalia, 2005, hlm. 269).

2 Inflasi Karena Kesalahan Manusia

Selain karena faktor alam, Imam Al-Maqrizi menyatakan inflasi bisa terjadi karena kesalahan manusia. Ia telah mengenali tiga hal yang menjadi penyebab terjadinya inflasi. Yaitu sebagai berikut:

a. Korupsi dan Administrasi yang Buruk

Imam Al-Maqrizi mengungkapkan bahwa pengangkatan pejabat-pejabat pemerintahan yang didasari oleh pemberian suap, dan tidak sesuai dengan kapabilitas, akan menempatkan orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Bahkan mereka rela mengorbankan seluruh harta yang dimilikinya sebagai kompensasi untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan. Hal ini mengakibatkan para pejabat pemerintahan tidak lagi bebas dari intervensi dan intrik para kroni yang ada pada tubuh pemerintahan.

Ketidakadilan yang tidak terkendali dari para penguasa ini membuat kondisi individu semakin kritis, sehingga mereka terusir dari tempat mereka dibesarkan dan bekerja. Selanjutnya, terjadi penurunan jumlah penduduk dan tenaga kerja yang tidak biasa serta hasil-hasil penciptaan lapangan kerja yang berdampak serius pada penurunan pendapatan pajak dan juga pendapatan negara (Maqrizi 1986, hlm. 52-53 dikutip dalam buku Euis Amalia, 2005, hlm. 270).

b. Pajak yang Berlebihan

Menurut Imam Al-Maqrizi, karena banyaknya penguasa yang mempunyai pola pikir untuk korupsi pada pemerintahan, konsumsi negara mengalami peningkatan yang luar biasa besarnya. Sebagai imbalannya, mereka melakukan sistem pemungutan pajak yang menganiaya rakyat, dengan memaksakan peraturan baru yang berbeda dan menaikkan tarif pajak yang ada, berdampak signifikan terhadap kondisi para petani yang merupakan pekerjaan mayoritas di masyarakat. Oleh karena itu, para petani kehilangan semangat untuk bekerja dan berkreasi. Mereka memilih untuk meninggalkan tempat asal mereka dan beralih menjadi pengembara di pedalaman. Dengan cara ini, akan terjadi pengurangan tenaga kerja dan perluasan lahan kosong yang akan sangat mempengaruhi tingkat produksi padi dan produk pertanian lainnya dan pada akhirnya menyebabkan kekurangan

pangan dan peningkatan biaya. (Al-Maqrizi 1986 , hlm. 50-51 dikutip dalam Adiwarmman Azwar Karim, 2006 , hlm. 428).

c. Peningkatan Sirkulasi Mata Uang Fulus

Seperti yang sudah dipaparkan diatas, pada mulanya uang fulus mempunyai nilai intrinsik yang lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai nominalnya ketika dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak signifikan. Oleh karena itu, hanya sejumlah kecil uang yang tersedia untuk digunakan. Ketika defisit anggaran terjadi karena buruknya perilaku pemerintah yang membelanjakan uang negara untuk berbagai kepentingan individu dan masyarakat, maka pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar. Menurut Imam Al-Maqrizi, aktivitas ini semakin tidak terbatas ketika keinginan pemerintah adalah untuk memperoleh laba yang sangat besar dari pencetakan uang yang tidak memerlukan biaya pembuatan yang sangat tinggi. Jumlah fulus yang dimiliki masyarakat pada umumnya semakin bertambah dan arus kas semakin meningkat, sehingga fulus berubah menjadi uang yang dominan (Al-Maqrizi 1986, hlm. 71 dikutip dalam Adiwarmman Azwar Karim, 2006, hlm. 429).

Pada kondisi ini, menempatkan fulus menjadi standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Akibat dari adanya kebijakan pencetakan fulus secara besar, menurut Imam Al-Maqrizi, hal ini

sangat berpengaruh terhadap penurunan nilai mata uang secara drastik. Menyebabkan, uang tidak lagi berharga dan bernilai dan harga-harga barang dan jasa membumbung tinggi yang pada akhirnya akan menimbulkan kelangkaan bahan makanan (Al-Maqrizi 1986, hlm. 72 dikutip dalam Adiwarman Azwar Karim, 2006 , hlm. 429).

Dalam karya-karyanya, terutama dalam "Al-Mawa'iz wa al-Itibar bi Dhikr al-Khitat wa al-Athar," Imam Al-Maqrizi memberikan perhatian khusus kepada isu-isu ekonomi dan mata uang. Dia memahami pentingnya stabilitas mata uang dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara.

Pandangan Al-Maqrizi tentang mata uang dinar dan dirham dapat diringkas sebagai berikut:

1. Stabilitas Mata Uang: Imam Al-Maqrizi menganggap kestabilan mata uang, seperti dinar dan dirham, menjadi angka penting dalam menjaga kesehatan keuangan. Perubahan uang atau perbedaan besar dalam nilai mata uang dapat mengganggu investasi, perdagangan, dan kepercayaan ekonomi pada suatu Negara.
2. Pengaruh Pemerintah: Ia juga menonjolkan peran pemerintah dalam menangani uang tersebut. pemerintah harus menjaga kualitas dan bobot dinar dan dirham, untuk menghindari devaluasi yang tidak wajar, dan

menghentikan upaya duplikasi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap mata uang.

3. Peran Mata Uang dalam Perdagangan: Imam Al-Maqrizi paham betul bahwa mata uang adalah alat penting dalam perdagangan internasional maupun dalam negeri. Kestabilan mata uang memungkinkan harga-harga barang dan juga jasa dapat diukur secara konsisten, membantu pertukaran lintas lini, dan meningkatkan keamanan moneter.

Dalam konteks ekonomi Mesir pada masanya, mata uang dinar dan dirham mempunyai peran penting dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pandangan Imam Al-Maqrizi tentang pentingnya menjaga stabilitas mata uang sebagai elemen yang sangat penting dalam mencapai stabilitas ekonomi adalah saling berkaitan. Pandangannya menggambarkan pemahaman tentang bagaimana mata uang yang stabil bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan ekonomi dan kestabilan sosial pada masa itu.